



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD DIHAN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 93522

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.949.950.000

1. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 186.550.000
2. Tanah Seluas 1740 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 1.650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 612 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 750.400.000
4. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 143.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 852 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 1.220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA DIB02N12L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.259.613



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 4.159.659.613

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 4.159.659.613

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.